

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

2022

KABUPATEN LOMBOK UTARA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

2022

KABUPATEN LOMBOK UTARA



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2022 KABUPATEN LOMBOK UTARA

ISSN : -
No. Publikasi :
Katalog :
Ukuran Buku : **B5 (17,6 cm x 25 cm)**
Jumlah Halaman : **vii + 37 halaman**

Penyusun Naskah: BPS Kabupaten Lombok Utara

Penyunting : BPS Kabupaten Lombok Utara

Gambar Kulit : canva.com

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Boleh dikutip dengan mencantumkan sumber.

TIM PENYUSUN
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2022
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Penanggung Jawab

Drs. Syamsudin

Editor

Dinar Ayu Hajar Meiasri, ST

Penulis

Intan Maulida Khoirun Nisa', S.Tr.Stat

Pengolah Data

Intan Maulida Khoirun Nisa', S.Tr.Stat

Desain Kulit dan Tata Letak

Intan Maulida Khoirun Nisa', S.Tr.Stat

Kata Pengantar

Publikasi **Indeks Kemahalan Konstruksi 2022 Kabupaten Lombok Utara** merupakan publikasi pertama yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lombok Utara dengan pembahasan terkait harga kemahalan konstruksi di Kabupaten Lombok Utara. Publikasi ini menyajikan data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Lombok Utara yang meliputi tingkat kemahalan harga barang dan jasa konstruksi dibandingkan kota acuan.

Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Data IKK merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan data IKK di Kabupaten Lombok Utara.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna sehingga belum dapat memenuhi konsumen data. Oleh karena itu, dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi di masa mendatang.

Gangga, Desember 2022

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Lombok Utara



Drs. Syamsudin



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Grafik.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Cakupan	2
Konsep Definisi	3
Metodologi.....	7
3.1. Indeks Kemahalan Konstruksi.....	7
3.2. Paket Komoditas IKK.....	8
3.3. Diagram Timbang IKK.....	10
3.4. Dana Alokasi Umum (DAU)	10
3.5. Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	12
3.6. IKK 2022	13
Ulasan Singkat.....	15
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara.....	15
4.2. Dana Alokasi Umum Kabupaten Lombok Utara.....	20
4.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lombok Utara	21
Lampiran.....	25
Daftar Pustaka.....	31

Daftar Tabel

No Tabel	Judul Tabel	Hlm
Tabel 4.1.	Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara (Km), 2021.....	18
Tabel 4.2.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lombok Utara (Km), 2019–2021.....	19
Tabel 4.3.	Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (miliar rupiah), 2022.....	20
Tabel 4.4.	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022.....	23

<https://lombokutarakab.go.id>



Daftar Gambar

No Gambar	Judul Gambar	Hlm
Gambar 4.1.	Peta Wilayah Kabupaten Lombok Utara 2022.....	15
Gambar 4.2.	Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan, 2021.....	16
Gambar 4.3.	Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Utara , 2021.....	19

<https://lombokutarakab.bps.go.id>



Daftar Grafik

No Grafik	Judul Grafik	Hlm
Grafik 4.1.	Tinggi Wilayah menurut Kecamatan (mdpl), 2021.....	17
Grafik 4.2.	Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Level Nasional, 2018–2022	21
Grafik 4.3.	Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lombok Utara pada Level Provinsi, 2018–2022.....	22

<https://lombokutarakab.bps.go.id>



Daftar Lampiran

No Lampiran	Judul Lampiran	Hlm
Lampiran	1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018 (Kota Semarang = 100).....	26
Lampiran	2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 (Kota Semarang = 100).....	27
Lampiran	3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020 (Kota Semarang = 100).....	28
Lampiran	4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021 (Kota Makassar = 100).....	29
Lampiran	5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022 (Kota Makassar = 100).....	30

<https://lombokutara.ac.id>



Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak diundangkannya kebijakan otonomi daerah (Otda) pada tahun 2000, pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU diduga memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini dengan harapan pembagian DAU ke daerah menjadi lebih adil, proporsional dan merata. Dalam formulasi DAU, salah satu variabel yang dibutuhkan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan. Menurut World Bank, Indonesia sebagai negara

kepulauan dengan kondisi geografis yang relatif beragam dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, infrastruktur diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi di Indonesia. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut.

1.2. Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia.

1.3. Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018–2022.



Konsep Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses engumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

- **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
- **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/*supplier* bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
- **Pedagang besar (PB)** adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.
- **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif meng- ingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
- **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.
- **Bahan bangunan atau konstruksi** didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

- **Kegiatan Konstruksi** didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang tercatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.
- **Harga sewa alat berat konstruksi** didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.
- **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/hari.
- **Upah** adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.
- **Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)** merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan.

- **Paket komoditas** adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas representativeness dan comparability yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.
- **Kualitas provinsi** adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.
- **Diagram Timbang atau bobot** yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang IKK menurut kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenis bangunan. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan dalam memperoleh IKK umum setelah diperoleh IKK masing-masing kelompok jenis bangunan.

3.1. Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan atau jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan, digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Disisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Dengan pertimbangan ini, disepakati penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga input.

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya. Penentuan kota acuan dalam penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013 sampai 2014 digunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan.

Tahun 2015 hingga 2017 digunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan, sedangkan tahun 2018 hingga 2020 digunakan Kota Semarang sebagai kota acuan. Pada tahun 2021 dan 2022 sendiri yang menjadi kota acuan adalah Kota Makassar.

3.2. Paket Komoditas IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs* (ICP) tahun 2005. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Dalam metode BOCC, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ). Mengacu pada pendekatan BOCC, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi.

IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan yaitu bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; prasarana pekerjaan umum untuk pertanian; jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya. Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut.

A. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi:
3. konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

- B. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:
1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (resorvoir), bendung (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 2. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi:
 3. Bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
- C. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan:
1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu rambu lalu lintas.
 2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- D. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi:
1. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 2. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 3. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 4. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 5. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
 6. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 7. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

8. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
9. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
10. Bangunan lainnya, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

3.3. Diagram Timbang IKK

Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2022 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2022 menggunakan penimbang updating *Bill of Quantity* (BoQ) sampai tahun 2021. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

3.4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya.

Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

3.5. Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Dalam proses penghitungan IKK menggunakan 3 (tiga) penimbang yaitu w_1 , w_2 , dan w_3 . Penimbang pertama (w_1) yakni Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pembentukan Barang Modal Bangunan yang digunakan untuk menghitung IKK dari PPP Proyek. Penimbang kedua (w_2) yakni data dari *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan proyek yang sudah selesai (bukan RAB). Penimbang ini digunakan untuk menghitung PPP Jenis Bangunan dari PPP Sistem. Penimbang ketiga (w_3) yakni data dari Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 (perubahan atas Peraturan Menteri Tahun 2013) yang digunakan untuk menghitung nilai komponen dari harga material dan upah jasa konstruksi.

Penghitungan IKK 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n P_k Q_k$$

Keterangan

NK_j = Nilai komponen ke-j

P_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

Q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung **Purchasing Power Parity** (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi **Country Product Dummy** (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

Keterangan

NK_j = Nilai komponen ke-j

C_i = *Dummy* kabupaten/kota ke-i

P_{jk} = *Dummy* komponen ke-j dalam suatu sistem/bangunan

ε = Galat

a_i dan β_j = Koefisien Regresi

$$PPP_{sistem_j} = \exp(a_i)$$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{sistem_i})^{w_{2i}}$$

Keterangan:

n = jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{bangunan_i}) \right)^{\frac{1}{n}}$$

Keterangan

n = jumlah bangunan dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_i = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_i} \right) \times 100$$

Keterangan:

n = jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

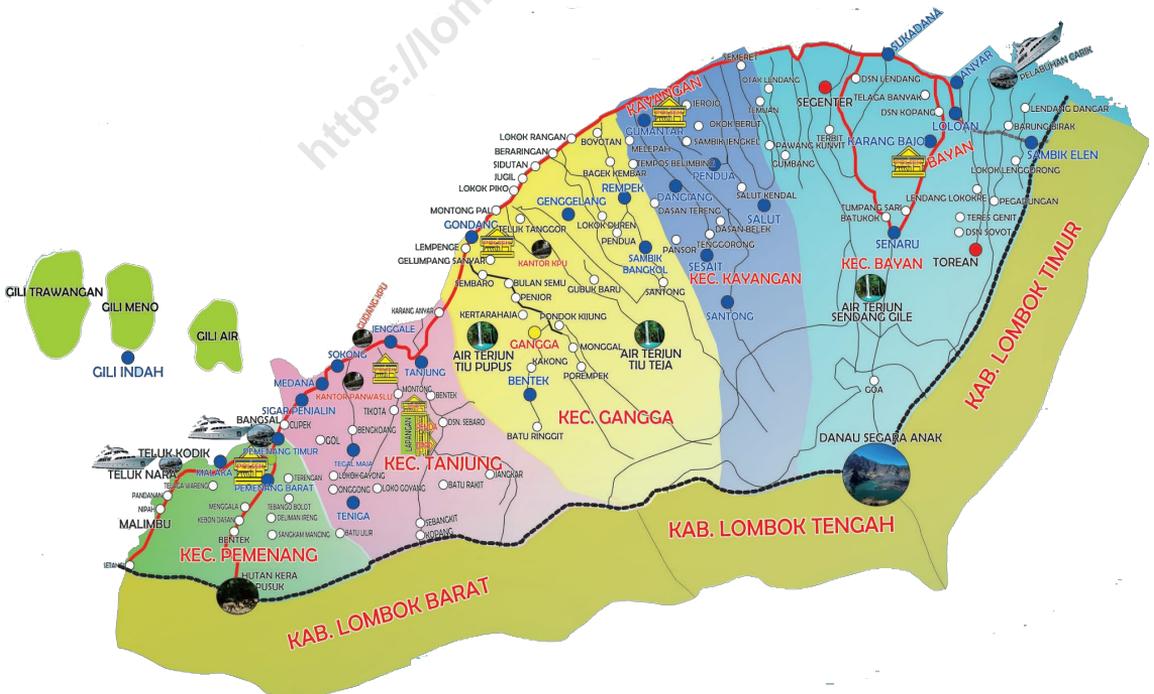
3.6. IKK 2022

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2022 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to date yaitu menggunakan *updating* BoQ tahun 2021.

IKK tahun 2022 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2022 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Kota acuan yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 merupakan kota acuan baru yaitu Kota Makassar. Kota acuan IKK sebelumnya yaitu Kota Semarang untuk IKK 2018–2020, Kota Surabaya untuk IKK 2015–2017 dan Kota Samarinda untuk IKK 2012–2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara Kondisi Wilayah Kabupaten Lombok Utara

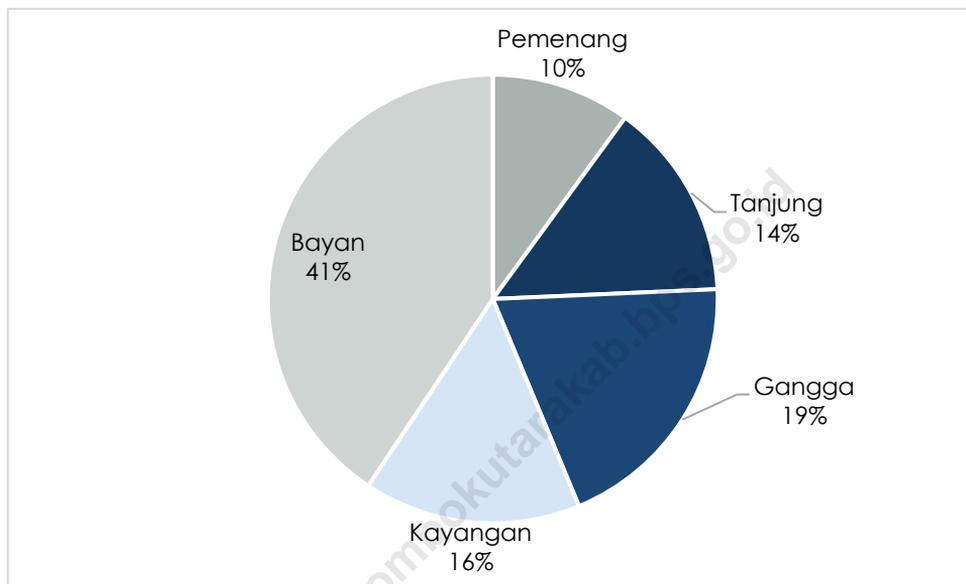
Secara definitif, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 10 kabupaten/kota yang terbagi di dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Lombok. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lombok Utara memiliki batas-batas: Utara - Laut Jawa; Selatan - Kecamatan Gunung Sari dan Narmada (Kabupaten Lombok Barat) serta Kecamatan Batukliang (Kabupaten Lombok Tengah); Barat - Selat Lombok dan Kecamatan Batu Layar (Kabupaten Lombok Barat); Timur - Kecamatan Sambelia (Kabupaten Lombok Timur).



Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Lombok Utara 2022

Sumber: Portal Resmi Kabupaten Lombok Utara

Luas wilayah Kabupaten Lombok Utara sebesar 80.953 hektar yang terbagi menjadi lima kecamatan dan 43 desa. Ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Tanjung. Wilayah terluas dari kelima kecamatan adalah Kecamatan Bayan sebesar 41 persen. Sementara wilayah terkecil adalah Kecamatan Pemenang sebesar 14 persen. Kecamatan Pemenang merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki tiga pulau yaitu Desa Gili Indah yang terdiri dari Pulau Gili Air, Pulau Gili Meno, dan Pulau Gili Trawangan.



Gambar 4.2. Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan, 2021

Sumber: Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Lombok Utara

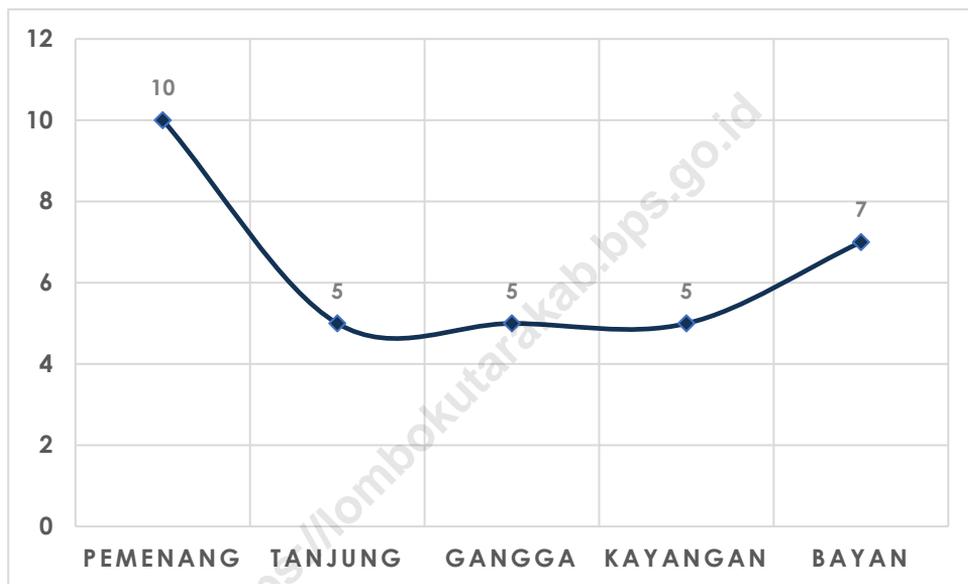
Jarak antar ibukota kecamatan menuju Kecamatan Tanjung (Ibukota Kabupaten Lombok Utara) berada di antara 7 hingga 40 km. Kecamatan Bayan sebagai kecamatan terjauh dari ibukota sejauh 40 km.

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan 809.53 Km² yang terdiri dari wilayah khusus (hutan lindung, kawasan margasatwa, dll) seluas 361,86 Km² (44,30 persen) dan sisanya daratan rata untuk lahan pertanian dll seluas 447,67 Km² 55,30 persen). Luas wilayah perairan Lombok Utara adalah 594,71 Km² dengan panjang pantai 127 Km.

Bagian tenggara hingga selatan Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah pegunungan karena di bawah kaki Gunung Rinjani, sehingga pada wilayah ini merupakan kawasan pariwisata untuk pendakian ke Gunung Rinjani. Sementara wilayah barat Kabupaten Lombok Utara, terdapat tiga pulau yang berada di Selat Lombok dan merupakan kawasan pariwisata, yaitu Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air).

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Lombok Utara, dua kawasan tersebut memiliki fasilitas yang lebih baik seperti ketersediaan akomodasi jangka pendek (hotel), transportasi (kapal), dan lain sebagainya.

Berdasarkan relief dan topografi di Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang berada di ketinggian 10 mdpl. Kecamatan Bayan juga memiliki ketinggian yang tidak jauh beda yaitu 7 mdpl. Kedua kecamatan tersebut lebih tinggi dibandingkan ibukota Kabupaten Lombok Utara yaitu Kecamatan Tanjung yang berada di ketinggian 5 mdpl.



Grafik 4.1. Tinggi Wilayah menurut Kecamatan (mdpl), 2021

Sumber: Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Lombok Utara

Kondisi Transportasi Kabupaten Lombok Utara

Sarana transportasi memegang peranan penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Kelancaran mobilitas penduduk dan barang sangat mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Untuk mempermudah lalu lintas penduduk serta perdagangan antar daerah, keberadaan jalan sangat mutlak diperlukan. Untuk itu perlu diadakan pembangunan dan peningkatan kondisi jalan agar perdagangan antar daerah dapat dilakukan dengan lancar, cepat dan mudah. Selain sarana transportasi, masyarakat Kabupaten Lombok Utara pun makin menyadari pentingnya alat komunikasi. Kebutuhan akan alat komunikasi pun menunjukkan adanya peningkatan.

Secara umum kondisi jalan raya di Kabupaten Lombok Utara cukup baik. Indikasi ini terlihat dari kondisi jalan di tahun 2021 yaitu 228,43 km jalan kondisi baik, 100,27 km jalan kondisi sedang, 32,87 km jalan kondisi rusak dan 38,59 km jalan kondisi rusak berat.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi tiga, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Tabel 4.1. Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara (Km), 2021

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara	78,02	82,09	84,4
Provinsi	9,78	9,78	9,78
Kabupaten	400,07	400,07	400,07

Sumber: Badan Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

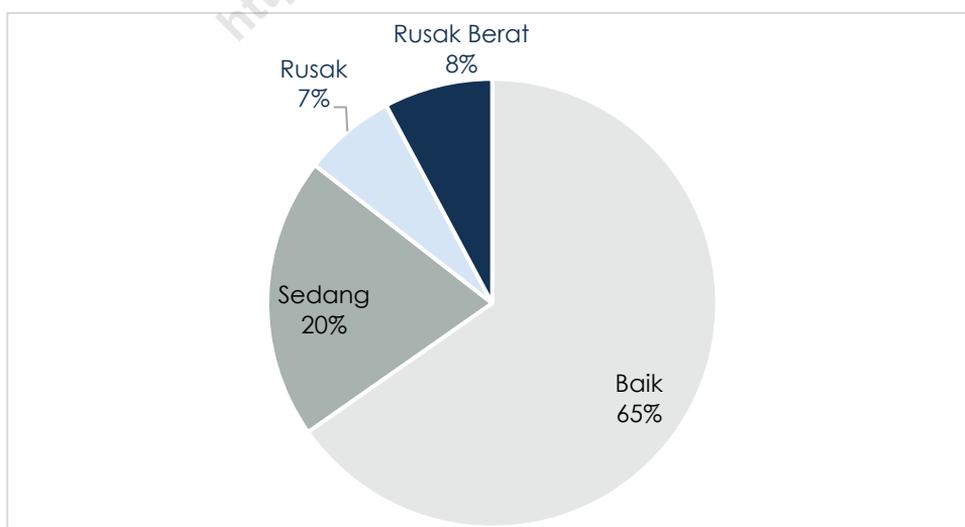
Jenis permukaan jalan di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2021 terdapat empat jenis yaitu Aspal, Kerikil, Tanah dan Lainnya. Panjang jalan seluruhnya terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Permukaan jalan di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2021 sudah didominasi oleh jalan aspal sepanjang 446,96 km. Untuk permukaan jalan kerikil sepanjang 30,53 km, permukaan jalan tanah sepanjang 14,34 km dan permukaan jalan terpendek adalah permukaan lainnya sepanjang 2,41 km.

Tabel 4.2. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lombok Utara (Km), 2019–2021

Jenis Permukaan Jalan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal	466,12	424,99	446,96
Kerikil	0	45,8	30,53
Tanah	18,75	18,75	14,34
Lainnya	3	2,4	2,41

Sumber: Badan Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan kondisi jalan, sejak tahun 2019 hingga 2021, kondisi jalan di Kabupaten Lombok Utara sudah mengalami peningkatan. Panjang jalan dengan kondisi baik semakin bertambah sementara panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat semakin berkurang. Pada tahun 2021, jalan dengan kondisi baik sepanjang 322,61 km (65 persen), jalan dengan kondisi sedang sepanjang 100,27 km (20 persen), jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 32,85 km (7 persen) dan 38,59 km (8 persen).



Gambar 4.3. Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Utara, 2021

Sumber: Badan Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

4.2. Dana Alokasi Umum Kabupaten Lombok Utara

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 26 persen dari penerimaan Dalam Negeri. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Alokasi DAU bagi setiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Suatu daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Besaran DAU per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (miliar rupiah), 2022

Kabupaten/Kota	DAU (miliar rupiah)
(1)	(2)
Lombok Barat	717,54
Lombok Tengah	939,41
Lombok Timur	1072,53
Sumbawa	781,73
Dompu	536,57
Bima	833,3
Sumbawa Barat	371,04
Lombok Utara	374,28
Kota Mataram	569,74
Kota Bima	432,16
NTB	1.478,51

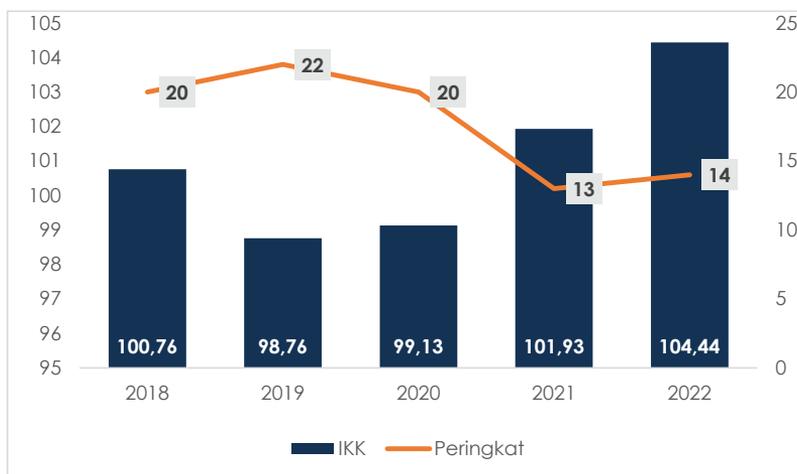
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI

Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lombok Utara termasuk nilai yang paling kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota terdekat lainnya. DAU Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 berniali 374,28 miliar rupiah, DAU terkecil kedua se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lombok Utara

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang merupakan indeks spasial digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dengan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

Pada tahun 2022, nilai IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 104,44. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 4,44 persen lebih mahal jika dibandingkan dengan Kota Makassar sebagai kota acuan. Jika dilihat dari besaran IKK-nya, rata-rata IKK di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih tinggi dibanding nilai IKK provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Hal ini diduga karena barang pabrikan banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa. Akan tetapi, jumlah produksi barang-barang natural relatif besar terutama di Pulau Lombok sehingga mendorong relatif lebih murah harga barang-barang natural tersebut.



Grafik 4.2. Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Level Nasional, 2018–2022

Sumber: Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi NTB 2022

Semakin tinggi nilai IKK suatu kabupaten/kota, semakin tinggi pula harga barang/jasa konstruksi di kabupaten/kota tersebut. IKK di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2018 mengalami peningkatan. Meskipun peringkat IKK Kabupaten Lombok Utara paling rendah di antara kab/kota se provinsi NTB, namun peringkat IKK mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2018, IKK Kabupaten Lombok Utara peringkat 10 namun pada tahun 2022 IKK Kabupaten Lombok Utara mengalami kenaikan peringkat menjadi peringkat 8 dari 10 kab/kota. Hal ini menunjukkan harga konstruksi di Kabupaten Lombok Utara cukup rendah

Pada tahun 2021, IKK Kabupaten Lombok Utara sebesar 97,38, nilai ini 2,62 persen lebih murah dibandingkan kota acuan yaitu Kota Makassar. Sedangkan pada tahun 2022, IKK Kabupaten Lombok Utara sebesar 100,31 yang berarti 0,31 persen lebih mahal dibandingkan kota acuan yaitu Kota Makassar. Kenaikan yang kecil ini menunjukkan bahwa pembangunan sebuah gedung di Kabupaten Lombok Utara memerlukan biaya yang semakin besar. Pada tahun 2022, jika membangun sebuah gedung di Kota Makassar membutuhkan biaya 100 juta rupiah, maka gedung yang sama ketika dibangun di Kabupaten Lombok Utara akan membutuhkan biaya sebesar 100,31 juta rupiah.



Grafik 4.3. Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lombok Utara pada Level Provinsi, 2018–2022

Sumber: Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi NTB 2022

Berdasarkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2022, peringkat IKK tertinggi adalah Kabupaten Bima dengan IKK 112,32. Hal ini berarti, dalam membangun sebuah gedung di Kabupaten Dompu 12,32 persen lebih mahal dibandingkan dengan Kota Makassar sebagai kota acuan. Peringkat kedua adalah Kota Bima (112,03) dan peringkat ketiga adalah Kabupaten Dompu (107,93). Ketiga kab/kota tersebut berada pada wilayah yang berdekatan dalam satu pulau (Pulau Sumbawa). Sementara peringkat terendah IKK adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan IKK 96,47. Hal ini berarti, jika membangun sebuah gedung di Kabupaten Sumbawa barat 3,53 persen lebih murah dibandingkan Kota Makassar.

Jika dibandingkan dengan kab/kota sekitar, Kabupaten Lombok Utara berada pada peringkat yang rendah. Pada tahun 2022, di antara Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur, IKK Kabupaten Lombok Utara (100,31) di bawah Kabupaten Lombok Tengah (102,23). Hal ini menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah gedung di Kabupate Lombok Utara lebih murah dibandingkan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 4.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

Kabupaten/Kota	IKK 2022
(1)	(2)
Lombok Barat	104,09
Lombok Tengah	102,23
Lombok Timur	106,43
Sumbawa	99,67
Dompu	107,93
Bima	112,32
Sumbawa Barat	96,47
Lombok Utara	100,31
Kota Mataram	104,09
Kota Bima	112,03
NTB	104,44

Sumber: Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi NTB 2022



Lampiran

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

Lampiran 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018 (Kota Semarang = 100)

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
5201	Lombok Barat	103,26	3
5202	Lombok Tengah	99,84	6
5203	Lombok Timur	103,82	2
5204	Sumbawa	99,15	8
5205	Dompu	96,55	9
5206	Bima	102,21	4
5207	Sumbawa Barat	107,11	1
5208	Lombok Utara	95,14	10
5271	Kota Mataram	101,56	5
5272	Kota Bima	99,49	7
5200	NTB	100,76	20

Lampiran 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 (Kota Semarang = 100)

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
5201	Lombok Barat	100,91	3
5202	Lombok Tengah	98,04	7
5203	Lombok Timur	99,67	5
5204	Sumbawa	96,26	8
5205	Dompu	93,37	10
5206	Bima	102,05	2
5207	Sumbawa Barat	100,66	4
5208	Lombok Utara	94,04	9
5271	Kota Mataram	104,44	1
5272	Kota Bima	98,69	6
5200	NTB	98,76	22

Lampiran 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020 (Kota Semarang = 100)

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
5201	Lombok Barat	96,56	8
5202	Lombok Tengah	99,07	6
5203	Lombok Timur	99,21	5
5204	Sumbawa	94,49	9
5205	Dompu	93,52	10
5206	Bima	103,83	2
5207	Sumbawa Barat	100,44	4
5208	Lombok Utara	97,33	7
5271	Kota Mataram	106,56	1
5272	Kota Bima	100,99	3
5200	NTB	99,13	20

Lampiran 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021 (Kota Makassar = 100)

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
5201	Lombok Barat	98,8	8
5202	Lombok Tengah	102,1	5
5203	Lombok Timur	105,61	3
5204	Sumbawa	96,64	10
5205	Dompu	101,44	6
5206	Bima	107,49	1
5207	Sumbawa Barat	100,01	7
5208	Lombok Utara	97,38	9
5271	Kota Mataram	103,75	4
5272	Kota Bima	106,74	2
5200	NTB	101,93	13

Lampiran 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022 (Kota Makassar = 100)

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
5201	Lombok Barat	104,09	5
5202	Lombok Tengah	102,23	7
5203	Lombok Timur	106,43	4
5204	Sumbawa	99,67	9
5205	Dompu	107,93	3
5206	Bima	112,32	1
5207	Sumbawa Barat	96,47	10
5208	Lombok Utara	100,31	8
5271	Kota Mataram	104,09	5
5272	Kota Bima	112,03	2
5200	NTB	104,44	14



Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. (2022). *Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2022*. Gangga Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2022). *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022*. Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemenkeu, DJPK. (2021, Desember 30). Alokasi dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Retrieved from Portal Data SIKD: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (2022, Desember 30). Portal Resmi Kabupaten Lombok Utara. Retrieved from Peta Wilayah: <http://lombokutarakab.go.id/>



D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Jl. Raya Gangga-Bayan, Genggelang-Gangga, Kabupaten Lombok Utara

Homepage: lombokutarakab.bps.go.id

E-mail: bps5208@bps.go.id